



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JEMAJA TIMUR

Tahun

2025 - 2029



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur periode 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Jemaja Timur dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, serta pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Renstra ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sekaligus memperhatikan potensi lokal dan aspirasi masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, ide, maupun data yang relevan. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengoptimalkan potensi Kecamatan Jemaja Timur sekaligus menghadapi tantangan yang ada selama lima tahun mendatang. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jemaja Timur.

Dapit, 11 September 2025

Plt Camat Jemaja Timur



Tetti Amalia, SE

Penata Tk.I/ III.d

NIP. 19810828 201001 2 022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN,DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Aparatur.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	20
2.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	25
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23
2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	28
2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
2.10 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
41	
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	35
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN SERTA	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	44
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	45
BAB V PENUTUP.....	46



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	11
Tabel 2. 2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	12
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	12
Tabel 2. 4	
Sarana dan Prasarana Pendukung	12
Tabel 2. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.....	12
Tabel 2. 6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	22
Tabel 2. 7	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	29
Tabel 3. 1	
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	38
Tabel 3. 2	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
Tabel 4. 1	
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jemaja Timur	43
Tabel 4. 2	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	49
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.....	8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Jemaja Timur merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang unik. Sebagai kecamatan yang didominasi oleh wilayah kepulauan, Kecamatan Jemaja Timur menghadapi tantangan dalam aksesibilitas, distribusi layanan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan strategis yang terarah dan berkelanjutan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan.

Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, Kecamatan Jemaja Timur juga menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang lebih baik, dan kebutuhan akan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, perencanaan strategis ini dirancang untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai tindak lanjut dari mandat perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Renstra Kecamatan Jemaja Timur periode 2025–2029 menjadi dokumen penting yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas kecamatan untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.



Dalam penyusunannya, Renstra ini mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Proses penyusunan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, pemangku kepentingan, hingga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Potensi lokal Kecamatan Jemaja Timur, seperti sektor perikanan, pariwisata bahari, dan kearifan lokal, menjadi keunggulan yang harus dioptimalkan. Namun, potensi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap pasar, dan risiko perubahan iklim. Renstra ini diharapkan mampu menjadi dokumen strategis yang tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memberikan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk pembangunan kecamatan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Jemaja Timur dapat bekerja sama secara sinergis dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya bersama dalam menghadirkan perubahan positif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas secara keseluruhan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jemaja Timur periode 2025–2029 memiliki maksud utama sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan arah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah secara efektif dan efisien.



b. Tujuan

Tujuan utama penyusunan Renstra ini adalah untuk menyelaraskan visi dan misi Kecamatan Jemaja Timur dengan kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini bertujuan agar setiap program kerja kecamatan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Secara khusus, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan dokumen panduan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas Kecamatan Jemaja Timur selama lima tahun ke depan.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi wilayah yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan.
3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah kecamatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.
4. Membangun sistem perencanaan yang akuntabel dan transparan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Mendorong implementasi program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.
6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Kecamatan Jemaja Timur, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Jemaja Timur periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Kecamatan Jemaja Timur, telaah dan rumusan isu – isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Kecamatan Jemaja Timur. Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jemaja Timur memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kecamatan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum di wilayahnya. Tugas ini mencakup koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan program prioritas daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Jemaja Timur menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan desa serta menyelaraskan program kerja dengan kebijakan daerah.

2. Pelayanan Publik

Menyelenggarakan layanan administratif kepada masyarakat, termasuk penerbitan dokumen kependudukan, perizinan tertentu, dan pelayanan lainnya.

3. Pelaksanaan Pembangunan



Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset

Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Camat

Pimpinan kecamatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Membantu camat dalam koordinasi administrasi, yang terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan

3. Seksi-seksi Teknis

Melaksanakan tugas-tugas teknis kecamatan, yang meliputi:

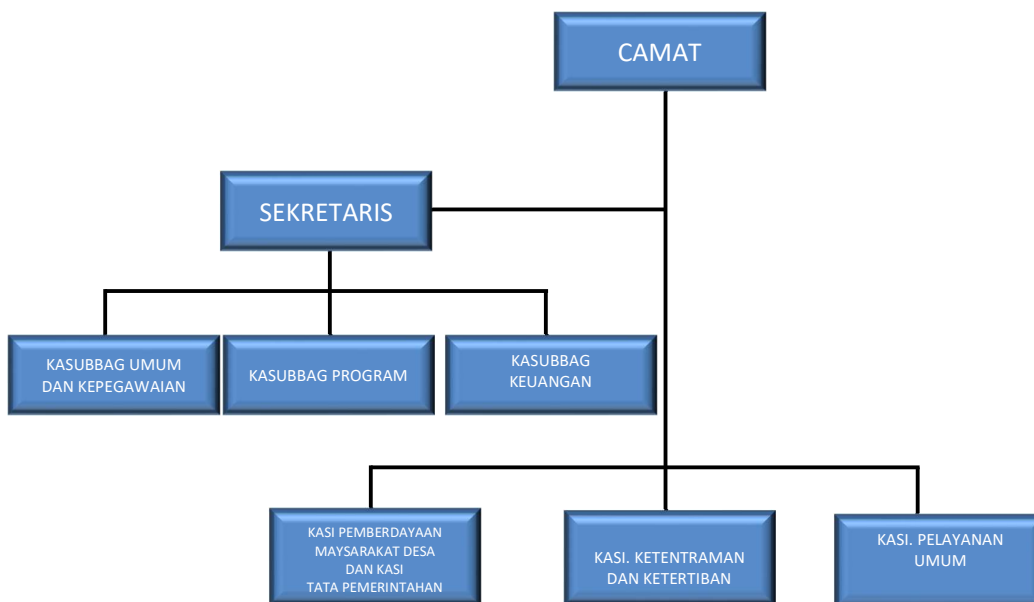
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Seksi Pelayanan Umum

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mendukung pelaksanaan tugas tertentu berdasarkan keahlian dan kompetensi masing-masing. Lebih lanjut Struktur Organisasi Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Jemaja Timur
Kabupaten Kepulauan Anambas



2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Jemaja Timur Per Januari 2025 berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 11 Pegawai Negeri Sipil dan 19 Pegawai Tidak Tetap. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :



a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina	Eselon III.a	1 Orang
Penata	Eselon III.b	0 Orang
Penata Tk. I	Eselon IV.a	2 Orang
Penata	Eselon IV.a	1 Orang
Penata Muda Tingkat I	Eselon IV.b	1 Orang
Penata Muda	Eselon IV.b	1 Orang
Penata Muda	Staf	0 Orang
Pengatur Tingkat I	Staf	5 Orang
Pelaksana	Staf	0 Orang
Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja	Staf	29 Orang
Jumlah		40 Orang

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Kecamatan Jemaja Timur tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai beri



Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	ASN : 11 Orang	S2 : 0 Orang
		S1 : 5 Orang
		D3 : 1 Orang
		D2 : 0 Orang
		SMA/SMK : 5 Orang
		SMP/SLTP : 0 Orang
2	PPPK : 27 Orang	S1 : 13 Orang
		D1 : 0 Orang
		SMA/SMK : 14 Orang
		SMP/SLTP : 0 Orang
		SD : 2 Orang
Jumlah		40 Orang

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Kecamatan Jemaja Timur didominasi kaum perempuan yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	7	4
PPPK	16	13
Jumlah	23	17

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Kecamatan Jemaja Timur. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di



seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan P3K ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Timur juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber



daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Kecamatan Jemaja Timur diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	3 Unit	2022
2	Printer	5 Unit	2022
3	PC	4 Unit	2022
4	Printer	6 Unit	2017
6	Meja Rapat	1 Unit	2017
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
11	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
15	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
16	Kursi Tamu	1 Set	2017
17	Lemari Arsip	2 Buah	2017
18	Proyektor	0 Buah	2017
19	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018
20	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
21	Lemari Arsip	4 Unit	2018
22	Lemari Buku	1 Unit	2018
23	Laptop	2 Unit	2018
24	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
25	Lemari Arsip	2 Unit	2019
26	Lemari Buku	2 Unit	2019
27	Laptop	4 Unit	2019
28	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
29	Printer	4 Unit	2019
30	Sepeda Motor	1 Unit	2020



2.3 Kinerja Pelayanan

Kecamatan Jemaja Timur terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan administratif seperti pengelolaan dokumen kependudukan, perizinan, dan layanan informasi publik dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Jemaja Timur juga mengembangkan pendekatan yang berbasis teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Kecamatan Jemaja Timur aktif dalam membina dan mendampingi desa-desa di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti kegiatan jemput bola untuk pengelolaan dokumen, telah menjadi salah satu langkah inovatif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan sinergi antara perangkat kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat, Kecamatan Jemaja Timur menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas dan inklusif.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jemaja Timur
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	B (60,10)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)	B (60,10)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)		B (60,10)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)	B (81,2)	B (82)	B (83)	B (81,29)	B (82)		B (81,29)	B (82)	B (83)	B (81,29)	B (82)	
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	-	-	-	20%	40%	60%	100%	-	-	20%	40%	60%		-	-	20%	40%	60%	
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	85%	85%	87%		80%	80%	85%	85%	87%	



Kinerja Kecamatan Jemaja Timur terus menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Berdasarkan data indikator kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi meningkat secara konsisten dari kategori CC (51,56) pada tahun 2021 menjadi B (69) pada tahun 2025, dengan proyeksi mencapai BB (71) pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan, dari kategori B (81,29) pada tahun 2021 menjadi A (87) pada tahun 2026, menunjukkan keberhasilan Kecamatan Jemaja Timur dalam memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat.

Dalam mendukung pembangunan desa, Kecamatan Jemaja Timur telah menargetkan peningkatan persentase desa berkembang menuju desa mandiri, yang dimulai pada tahun 2025 dengan capaian awal sebesar 20% dan direncanakan mencapai 100% pada tahun 2026. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tetap menjadi prioritas utama, dengan target partisipasi mencapai 100% setiap tahun hingga tahun 2026. Data ini menggambarkan komitmen Kecamatan Jemaja Timur untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi yang kuat dalam setiap program pembangunan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan wilayah secara menyeluruh.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jemaja Timur, ya

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Jemaja Timur Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.403.916.029,00	3.006.374.848,00	3.205.534.069,00	3.037.166.506,00	3.236.041.141,00	3.021.067.434,00	1.671.044.027,00	2.868.243.505,00	2.181.206.831,00	2.332.603.129,00	-	-								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik					28.013.000,00	-	-	-	-	-	-	-								
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	374.925.000,00	315.127.500,00	251.112.500,00	165.515.400,00	133.364.712,00	100.000.000,00	130.990.000,00	245.084.000,00	102.613.500,00	162.176.000,00	-	-								
Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	-	-	50.000.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	10.000.000,00	-	-	42.225.000,00	36.494.000,00	-	-								
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.800.000,00	-	25.233.700,00	37.600.000,00	137.850.050,00	20.000.000,00	-	-	-	36.494.000,00	-	-								

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.951.000,00	-	46.590.600,00	30.115.400,00	16.115.400,00	10.000.000,00	-	-	24.018.000,00	7.150.000,00	-	-								



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jemaja Timur serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelayanan di Kecamatan Jemaja Timur menghadapi tantangan dari sisi kualitas dan kuantitas SDM. Beberapa perangkat kecamatan belum memiliki kompetensi yang optimal sesuai dengan tuntutan tugas, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai di beberapa bidang menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi staf yang ada.

2. Keterbatasan Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan seperti kantor, perangkat IT, dan sarana komunikasi masih belum memadai. Hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil, belum dapat dilakukan secara maksimal dan efisien.

3. Pengelolaan Anggaran yang Terbatas

Anggaran operasional kecamatan yang terbatas menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan program strategis, termasuk pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.



4. Kurangnya Integrasi Sistem Informasi

Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, seperti sistem administrasi terpadu, membuat proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efisien.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Jemaja Timur juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1. Karakteristik Wilayah Kepulauan

Sebagai wilayah kepulauan, Kecamatan Jemaja Timur menghadapi tantangan geografis yang cukup besar, termasuk aksesibilitas antarwilayah yang sulit dan ketergantungan pada moda transportasi laut. Hal ini memengaruhi distribusi pelayanan dan ketersediaan sumber daya di wilayah terpencil.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya peran aktif dalam pembangunan serta prosedur administratif, sehingga partisipasi mereka dalam berbagai program kecamatan masih perlu ditingkatkan.

3. Dampak Perubahan Iklim

Kecamatan Jemaja Timur yang memiliki karakteristik pesisir menghadapi risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi. Hal ini dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

4. Persaingan dengan Wilayah Lain

Dalam konteks pengembangan pelayanan dan pembangunan, Kecamatan Jemaja Timur perlu



bersaing dengan kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendapatkan alokasi sumber daya dan perhatian dari pemerintah daerah..

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Jemaja Timur dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Potensi Pariwisata dan Sumber Daya Alam

Kecamatan Jemaja Timur memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata bahari, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan yang baik terhadap potensi ini dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik.

2. Kemajuan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang besar bagi Kecamatan Jemaja Timur untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Implementasi layanan berbasis digital, seperti e-government dan aplikasi pelayanan masyarakat, dapat mempercepat proses administrasi dan memperluas jangkauan pelayanan.

3. Dukungan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan merupakan peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat. Hal ini dapat mendukung keberhasilan program pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal.

2.5 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

Sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja Timur memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik, membina pemerintahan desa, dan mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jemaja Timur dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang ada seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kinerja pelayanan yang optimal dan keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi secara mendalam untuk memahami permasalahan yang muncul dan isu strategis yang perlu ditangani.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Jemaja Timur tidak hanya mencakup aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga aspek eksternal seperti dampak perubahan iklim, tingkat partisipasi masyarakat, serta persaingan antardaerah dalam menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah. Dengan memahami permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Jemaja Timur dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala sekaligus memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung keberhasilan pembangunan di wilayahnya, Kecamatan Jemaja Timur perlu memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan menjadi langkah penting untuk mengungkap kendala-kendala yang muncul baik dari aspek internal maupun eksternal. Proses ini tidak hanya



bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Dengan pendekatan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, Kecamatan Jemaja Timur dapat menyusun langkah strategis yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Berikut disampaikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Timur, sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Pelayanan Administrasi Publik

- Kurangnya Aksesibilitas Layanan di Wilayah Terpencil

Wilayah geografis yang sulit dijangkau menyebabkan masyarakat di desa-desa terpencil mengalami keterbatasan akses terhadap layanan administrasi seperti penerbitan dokumen kependudukan dan perizinan.

- Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem pelayanan berbasis digital belum sepenuhnya diterapkan, sehingga proses pelayanan masih bergantung pada metode manual yang memakan waktu dan kurang efisien.

- Ketidacukupan Fasilitas Pelayanan

Beberapa fasilitas pendukung seperti kantor pelayanan, perangkat komputer, dan jaringan internet belum memadai untuk mendukung operasional yang optimal.

2. Permasalahan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa

Sebagian aparatur desa belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam mengelola pemerintahan



desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan administrasi.

- Koordinasi yang Belum Optimal

Sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa belum berjalan maksimal, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan kolaborasi intensif.

3. Permasalahan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata

Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayahnya.

- Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah

Banyak program pemberdayaan yang bergantung pada anggaran dari pemerintah daerah atau pusat, sehingga keberlanjutan program sering kali terganggu jika dukungan anggaran terbatas.

4. Permasalahan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Tantangan Penegakan Peraturan di Wilayah Terpencil

Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan dan penegakan peraturan secara konsisten.

- Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:



Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah yang Dihadapi	Akar Masalah
1	Pelayanan Administrasi Publik	- Kurangnya aksesibilitas layanan di wilayah perbatasan.	- Kondisi geografis yang masih belum terjangkau secara merata.
		- Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Sistem pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital.
		- Ketidacukupan fasilitas pendukung pelayanan.	- Keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas.
2	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.	- Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.
		- Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dan pemerintah desa.	- Kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan efektif.
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum merata.	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan.
		- Ketergantungan pada bantuan pemerintah dalam program pemberdayaan.	- Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan atau kemandirian masyarakat dalam menjalankan program.
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Tantangan penegakan peraturan di wilayah terpencil.	- Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan rutin.
		- Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.	- Minimnya edukasi tentang hukum dan peraturan kepada masyarakat.



Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis,
Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan
Sejahterah”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam empat (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang inovatif.
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Timur



terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) dan Ke-5 (Kelima) yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang inovatif.”.

2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Kecamatan Jemaja Timur yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri*. Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola



pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Kecamatan Jemaja Timur melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (a) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - (c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.



- (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis,



hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;

- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam



pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.



2.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Jemaja Timur memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas, pembinaan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat menjadi fokus perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Jemaja Timur.

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu strategis ini diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah isu-isu strategis Kecamatan Jemaja Timur:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, melalui pengembangan infrastruktur pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa

Meningkatkan kompetensi aparatur desa serta memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayah kecamatan.



4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah.

➤ Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan.

➤ Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui



Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Pemberdayaan Perempuan di Desa juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Desa.

- Masih minimnya fasilitas yang ramah terhadap isu gender
- Peningkatan pelayanan yang responsif terutama pada keadilan gender dan penyandang disabilitas

5. Peningkatan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Memperkuat penegakan hukum dan ketertiban umum melalui edukasi masyarakat serta pengawasan yang lebih efektif, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

6. Mitigasi Risiko Perubahan Iklim

Mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi, dengan menyusun kebijakan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat lokal.

Isu-isu strategis ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Jemaja Timur. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis isu strategis, diharapkan program-program yang dirancang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Jemaja Timur menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan yang ada. Tujuan-tujuan ini disusun berdasarkan analisis kondisi eksisting, potensi wilayah, dan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Melalui pendekatan yang terukur dan strategis, tujuan dan sasaran ini menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja di tingkat kecamatan.

Penetapan sasaran yang terukur dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yang relevan, mencakup berbagai aspek seperti kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran dapat dipantau secara sistematis, sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi pencapaian yang telah diraih.



Melalui tabel berikut, disajikan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai setiap tahun selama periode 2025-2029. Rincian ini menjadi komitmen Kecamatan Jemaja Timur dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan pembangunan yang inklusif. Implementasi tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat mendorong keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah Kecamatan Jemaja Timur.



Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jemaja Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	B	B	B	B	BB	BB	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Nilai SAKIP	63,66	65,34	67,05	68,72	70,46	71,86	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	76,69	76,82	77,45	77,75	77,90	77,90	



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Jemaja Timur menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program kerja selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran dirancang untuk mencapai hasil yang konkret dan terukur, sementara strategi dan kebijakan menjadi panduan dalam pelaksanaan program serta alokasi sumber daya. Pendekatan ini bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil pembangunan yang sesuai dengan prioritas wilayah.

Strategi difokuskan pada upaya menyelesaikan permasalahan mendasar, memanfaatkan potensi, dan menangkap peluang pembangunan. Sementara itu, arah kebijakan ditetapkan untuk memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dalam pelaksanaan strategi. Dengan sinergi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, Kecamatan Jemaja Timur berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya secara optimal. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:

Tabel. 3.2 (Table T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah			
Misi :	3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif			
	5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	- Mengembangkan infrastruktur pelayanan publik.	- Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan di wilayah perbatasan.



Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah			
Misi :	3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif			
	5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Digitalisasi sistem pelayanan administrasi.
			'- Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.	'- Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur desa.
			'- Membentuk mekanisme komunikasi dan rapat koordinasi berkala.	'- Penyusunan jadwal rutin dan pedoman pelaksanaan koordinasi.
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	- Meningkatkan kesadaran Masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi	- Penyusunan program edukasi pembangunan berbasis masyarakat.
			'- Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat berbasis ekonomi lokal.	'- Penambahan dukungan teknis dan finansial untuk program pemberdayaan.

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB IV

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran pembangunan Kecamatan Jemaja Timur periode 2025-2029, telah disusun rencana program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Selain itu, setiap program didukung oleh alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal.

Pendanaan untuk pelaksanaan program-program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan dukungan tambahan dari potensi sumber pendanaan lainnya. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan juga akan menjadi salah satu strategi dalam mengimplementasikan program.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Mendukung administrasi umum pemerintahan, seperti pengelolaan aset dan keuangan kecamatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelatihan dan pendampingan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menguatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketentraman wilayah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan melalui pembenahan tata kelola administrasi.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Menguatkan tata kelola desa melalui pelatihan aparatur dan supervisi rutin.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 (**Tabel T-C. 27.**)



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3,370,863,453	100%	3,404,562,088	100%	3,438,597,709	100%	3,472,973,686	100%	3,507,693,422
	2.Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	75%		80%		85%		90%		90%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	4,616,105	100%	4,616,105	100%	7,060,894	100%	9,530,130	100%	9,530,130
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1,316,105	3 Dokumen	1,329,266	3 Dokumen	1,316,105	3 Dokumen	2,699,251	3 Dokumen	2,699,251
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	500,000	3 Dokumen	505,000	3 Dokumen	1,244,789	3 Dokumen	1,000,000	3 Dokumen	1,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	505,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	505,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	1,500,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	1 Dokumen	505,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,330,879	1 Dokumen	1,330,879
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	300,000	1 Laporan	266,839	1 Laporan	500,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Penyelenggaraan Walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000	1 Laporan	500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	90%	3,260,881,874	90%	3,292,159,944	90%	3,323,750,776	90%	3,355,657,517	90%	3,387,883,325
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	11 Orang/Bulan	3,127,805,194	11 Orang/Bulan	3,159,083,246	11 Orang/Bulan	3,190,674,078	11 Orang/Bulan	3,222,580,819	11 Orang/Bulan	3,254,806,627
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	130,000,000	12 Dokumen	130,000,000	12 Dokumen	130,000,000	12 Dokumen	130,000,000	12 Dokumen	130,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,938,340	1 Laporan	1,938,340	1 Laporan	1,938,340	1 Laporan	1,938,340	1 Laporan	1,938,340
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 laporan	1,138,340	12 laporan	1,138,358	12 laporan	1,138,358	12 laporan	1,138,358	12 laporan	1,138,358
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	90%	6,321,621	90%	6,321,621	90%	6,321,621	90%	6,321,621	90%	6,321,621
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6,321,621	1 Laporan	6,321,621	1 Laporan	6,321,621	1 Laporan	6,321,621	1 Laporan	6,321,621
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Dokumen	34 Paket		34 Paket		34 Paket		34 Paket		34 Paket	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	90%	61,666,029	90%	64,086,594	90%	64,086,594	90%	64,086,594	90%	66,580,522
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1,340,900	5 Paket	1,340,900	5 Paket	1,340,900	5 Paket	1,340,900	5 Paket	1,340,900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	1,278,959	8 Paket	1,278,959	8 Paket	1,278,959	8 Paket	1,278,959	8 Paket	1,278,959
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1,082,170	5 Paket	1,082,170	5 Paket	1,082,170	5 Paket	1,082,170	5 Paket	3,576,098
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1,014,000	5 Paket	1,014,000	5 Paket	1,014,000	5 Paket	1,014,000	5 Paket	1,014,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Paket	1,950,000	12 Paket	1,950,000	12 Paket	1,950,000	12 Paket	1,950,000	12 Paket	1,950,000



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	55,000,000	120 Laporan	57,420,565	120 Laporan	57,420,565	120 Laporan	57,420,565	120 Laporan	57,420,565
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90%	37,377,824	90%	37,377,824	90%	37,377,824	90%	37,377,824	90%	37,377,824
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	13,279,200	12 laporan	13,279,200	12 laporan	13,279,200	12 laporan	13,279,200	12 laporan	13,279,200
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	20,000,000	12 laporan	20,000,000	12 laporan	20,000,000	12 laporan	20,000,000	12 laporan	20,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90%	2,211,274	90%	2,211,274	90%	2,211,274	90%	2,211,274	90%	2,211,274
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	1,162,550	2 Unit	1,162,550	2 Unit	1,162,550	2 Unit	1,162,550	2 Unit	1,162,550
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	3 Unit	724,800	3 Unit	724,800	3 Unit	724,800	3 Unit	724,800	3 Unit	724,800
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0%	89%	1,000,000	90%	1,000,000	90%	1,000,000	90%	1,000,000	90%	1,000,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0%	89%	1,000,000	90%	1,000,000	90%	1,000,000	90%	1,000,000	90%	1,000,000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang disusun	-	4 Laporan	1,000,000	4 Laporan	1,000,000	4 Laporan	1,000,000	4 Laporan	1,000,000	4 Laporan	1,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	80%	80%	200,000,000	80%	220,000,000	80%	242,000,000	80%	266,200,000	80%	279,510,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	80%	80%	200,000,000	80%	220,000,000	80%	242,000,000	80%	266,200,000	80%	279,510,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	77,000,000	1 Laporan	84,700,000	1 Laporan	93,170,000	1 Laporan	97,828,500
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	25 Orang	Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000	Lembaga Kemasyarakatan	110,000,000	Lembaga Kemasyarakatan	121,000,000	Lembaga Kemasyarakatan	133,100,000	Lembaga Kemasyarakatan	139,755,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga		1 Paket Unit	30,000,000	1 Laporan	33,000,000	1 Laporan	36,300,000	1 Laporan	39,930,000	1 Laporan	41,926,500



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	Kemasyarakatan yang di sediakan											
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	87%	39,996,200	89%	43,995,820	90%	47,418,421	90%	49,789,342	90%	52,278,809
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	87%	39,996,200	89%	43,995,820	90%	47,418,421	90%	49,789,342	90%	52,278,809
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	39,996,200	3 Laporan	43,995,820	3 Laporan	47,418,421	3 Laporan	49,789,342	3 Laporan	52,278,809
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	87%	129,877,000	89%	142,864,700	90%	150,007,935	90%	157,508,332	90%	171,684,082
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		87%	129,877,000	89%	142,864,700	90%	150,007,935	90%	157,508,332	90%	171,684,082
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	250 Orang	129,877,000	250 Orang	142,864,700	250 Orang	150,007,935	250 Orang	157,508,332	250 Orang	171,684,082
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	95,126,800	100%	101,158,114	100%	111,273,926	100%	119,543,901	100%	131,566,216
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	95,126,800	100%	101,158,114	100%	111,273,926	100%	119,543,901	100%	131,566,216
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	28,806,372	1 Dokumen	31,687,009	1 Dokumen	34,855,710	1 Dokumen	36,598,496	1 Dokumen	40,258,345
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	4 Laporan	66,320,428	4 Laporan	69,471,105	4 Laporan	76,418,216	4 Laporan	82,945,405	4 Laporan	91,307,871
total				3,836,863,453		3,913,580,722		3,990,297,991		4,067,015,260		4,143,732,529



Tabel 4.5 Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kecamatan Jemaja Timur Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	
2	Nilai SAKIP	Nilai	63.66	65.34	67.05	68.72	70.46	71.86	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengsukseskan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Persentase	70.66	70.67	70.68	70.69	77.46	77.49	



Tabel 4.6 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP	BAIK	63.66	65.34	67.05	68.72	70.46	71.86	71.86
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengsukseskan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	BAIK	76,69	76,69	76,82	77,45	77,90	77,90	77,90
3	Ideks Kepuasan Masyarakat	70	70	75	80	85	90	90	90



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jemaja Timur periode 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dokumen ini mencerminkan komitmen Kecamatan Jemaja Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang dimiliki serta mengantisipasi tantangan yang ada, Renstra ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi tercapainya tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Melalui kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini. Dengan semangat kerja sama dan komitmen yang tinggi, Kecamatan Jemaja Timur optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah kecamatan.

Dapit, 11 September 2025

Plt Camat Jemaja Timur



Tetti Amalia, SE

Penata Tk.I/ III.d

NIP. 19810828 201001 2 022